



FGD Energi Daerah di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur:

Memperkuat Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas
Daerah di Sektor Ketenagalistrikan melalui Kolaborasi
Pemerintah dan Pusat Studi Perguruan Tinggi

 **Jumat, 23 Agustus 2024**  **08.30 - 16.00 WITA**  **Hotel Aston Kuta, Bali**

FGD Energi Daerah di Wilayah Sumatera :

Memperkuat Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah di Sektor Ketenagalistrikan melalui Kolaborasi Pemerintah dan Pusat Studi Perguruan Tinggi
Hotel Aryaduta Medan || 30 Juli 2024



Perkenalan Project CASE for SEA



Agus Tampubolon

Manajer Program

Clean, Affordable and Secure
Energy for Southeast Asia, IESR

FGD Energi Daerah di Wilayah Sumatera :

Memperkuat Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah di Sektor Ketenagalistrikan melalui Kolaborasi Pemerintah dan Pusat Studi Perguruan Tinggi
Hotel Aryaduta Medan || 30 Juli 2024



Pemaparan RPJPN 2025-2045



Taufiq Hidayat Putra, Ph.D

**Direktur Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi dan Informatika
Kementerian PPN/Bappenas**

FGD Energi Daerah di Wilayah Sumatera :

Memperkuat Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah di Sektor Ketenagalistrikan melalui Kolaborasi Pemerintah dan Pusat Studi Perguruan Tinggi
Hotel Aryaduta Medan || 30 Juli 2024



Kata Sambutan



Ervan Maksum, ST, M.Sc

**Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Kementerian PPN/Bappenas**



SESI FOTO BERSAMA

FGD Energi Daerah di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur:

Memperkuat Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah di Sektor Ketenagalistrikan melalui Kolaborasi Pemerintah dan Pusat Studi Perguruan Tinggi
Hotel Aston Kuta || 23 Agustus 2024



Sesi 1

Yudiandra Yuwono

Penasihat Transisi Energi, GIZ
Energy Programme Indonesia and
ASEAN

Andri N.R. Mardiah

Direktorat Pendidikan Tinggi dan
IPTEK Kementerian PPN/Bappenas

Facilitated by:

Marcell Sinay

Penasihat Program CASE
GIZ Energy Programme Indonesia and ASEAN

Nike Diah Agustin

Staf Program CASE
Institute for Essential Services Reform



Presentasi 1

Gambaran proyeksi penyediaan dan permintaan energi di Wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur hasil pemodelan energi LTES



Yudiandra Yuwono

Energy Transition Advisor CASE
GIZ Indonesia



CASE
for Southeast Asia

Link presentasi



giz



IESR
Institute for
Essential Services
Reform



CASE
for Southeast Asia



Presentasi 2

Model Hub Regional (provinsi) dan peran pusat studi untuk pemanfaatan riset inovasi dalam mendukung pencapaian target pembangunan

Aruminingsih

Koordinator Difusi Pendidikan Tinggi dan IPTEK – Kementerian PPN/Bappenas



Link Presentasi

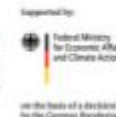


SESI DISKUSI

COFFEE BREAK

Latar belakang (1)

Hasil survey awal dan diskusi: Riset pemodelan/skenario energi untuk mendukung proses perencanaan kebijakan



95 % menyatakan bahwa **penting** untuk memiliki **peningkatan kapasitas** dalam **pemodelan energi**;

67% menyatakan **belum** memiliki pengalaman teknis terkait pemanfaatan tools/software pemodelan energi untuk perencanaan kebijakan

35% membutuhkan dukungan untuk menghubungkan analisis penelitian ke dalam proses pengembangan kebijakan

Adanya kebutuhan riset Pemodelan energi pada tingkat mikro (daerah) untuk memberikan masukan yang akurat bagi pemerintah provinsi.

Pentingnya riset terkait **monitoring dan evaluasi** target kebijakan energi yang sudah ditetapkan

Latar belakang (2)

Hasil survey awal dan diskusi: Kolaborasi Pusat Studi bidang energi dengan pemerintah



67 % belum bergabung dalam wadah kolaborasi dengan pusat studi energi dari kampus lain

32% belum berpartisipasi/terlibat dalam proses perencanaan kebijakan bersama pemerintah

Pendanaan: Universitas berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi pendanaan penelitian, misalnya melalui dana CSR.

Sudah banyak penelitian terkait energi di universitas, namun **tidak secara efektif terhubung** dengan proses perumusan kebijakan pemerintah

Perlunya forum koordinasi rutin di tingkat daerah untuk **saling memahami kebutuhan/ekspektasi** antara kampus dan pemerintah daerah

Kebutuhan akan Partisipasi yang Konkret dan berdampak dari pemerintah daerah maupun universitas

Tujuan dan Ekspektasi Diskusi



Tujuan

1. Mengidentifikasi bagaimana proses penyusunan kebijakan energi dan kebutuhan dukungan pemerintah daerah
2. Untuk menginisiasi kolaborasi dan keterhubungan antara penelitian dan keahlian universitas dengan kebutuhan tersebut.

Ekspektasi hasil

1. Potensi bentuk dan ruang kolaborasi untuk mendukung partisipasi yang konkret dan menjawab kebutuhan
2. Potensi bidang penelitian prioritas dan pertanyaan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan peran universitas.

Undangan Offline:
Fasilitator: Marcell & David

1. Kalimantan Barat
2. Kalimantan Tengah
3. Kalimantan Selatan
4. Kalimantan Timur
5. Kalimantan Utara
6. Sulawesi Utara
7. Gorontalo
8. Sulawesi Selatan
9. Sulawesi Tengah
10. Sulawesi Tenggara
11. Sulawesi Barat
12. Bali
13. NTB
14. NTT

Undangan Online:
Fasilitator: Rifqi & Nike



CASE
for Southeast Asia

**diskusi undangan online dilakukan di Break Out Room di zoom*

1. Maluku
2. Maluku Utara
3. Papua
4. Papua Barat
5. Papua Barat Daya
6. Papua Tengah
7. Papua Pegunungan
8. Papua Selatan

Pertanyaan Pemandu (1 dari 4) (25 menit)



Bagaimana pengalaman Pemerintah Provinsi dalam mengembangkan rencana energi daerah menggunakan tools pemodelan energi?

- a Memiliki pengalaman yang mapan dalam menggunakan tools pemodelan energi, dan mendapat hasil yang positif.
- b Telah menggunakan tools pemodelan energi dengan beberapa keberhasilan, tetapi membutuhkan dukungan dan penyempurnaan lebih lanjut.
- c Telah mulai menggunakan tools pemodelan energi, tetapi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
- d Memiliki pengalaman yang minim dalam menggunakan tools pemodelan energi untuk mengembangkan rencana energi daerah.

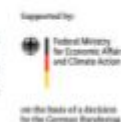
Pertanyaan Pemandu (2 dari 4) (25 menit)



Tantangan apa yang dihadapi Pemerintah Provinsi dalam melakukan pemodelan energi jangka panjang, dan dukungan spesifik apa yang dapat diberikan oleh universitas?

- a **Ketersediaan Data** – Kesulitan dalam data yang andal, valid, sesuai konteks, dan terkini untuk pemodelan yang akurat.
- b **Kapasitas Teknis** – Kurangnya keterampilan teknis atau alat yang memadai untuk melakukan pemodelan energi.
- c **Integrasi dengan Kebijakan** – Tantangan dalam menyelaraskan hasil pemodelan energi dengan pengembangan kebijakan.
- d **Keterhubungan dengan riset terkini** – Belum terhubungnya riset-riset energi di universitas dengan kebutuhan pemerintah provinsi
- e Lainnya: ...

Pertanyaan Pemandu (3 dari 4) (25 menit)



Apa bidang penelitian yang perlu diprioritaskan untuk membantu memperkuat perencanaan energi daerah?

85,7 %

Integrasi Energi Terbarukan: Penelitian tentang penggabungan sumber energi terbarukan ke dalam jaringan daerah.

78,6 %

Penyelarasan Kebijakan: Penelitian tentang cara menyelaraskan kebijakan lokal dengan strategi energi nasional.

57,1 %

Dampak Sosial-Ekonomi: Analisis dampak sosial dan ekonomi dari berbagai kebijakan energi.

35,7 %

Efisiensi Energi: Studi tentang peningkatan efisiensi energi di sektor-sektor utama.

Lainnya

Pertanyaan Pemandu (4 dari 4) (25 menit)



Bagaimana sumber daya penelitian dan keahlian yang ada di universitas dapat diadaptasi/diperluas untuk dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Provinsi?

100 %

Kolaborasi Langsung – Menyepakati proyek penelitian bersama antara universitas dan pemerintah provinsi.

85,7 %

Penelitian Terapan – Mengadaptasi penelitian akademik saat ini untuk lebih fokus pada tantangan spesifik daerah.

71,4 %

Pendanaan CSR – Memanfaatkan pendanaan CSR untuk mendukung penelitian kolaboratif antara universitas dan pemerintah.

35,7 %

Program Pelatihan Khusus – Mengembangkan program pelatihan khusus untuk staf pemerintah berdasarkan penelitian yang ada.

Lainnya



Guideline discussion



KESIMPULAN



ISHOMA



CASE
for Southeast Asia



PENGANTAR SESI-2

FGD Energi Daerah di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur:

Memperkuat Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah di Sektor Ketenagalistrikan melalui Kolaborasi Pemerintah dan Pusat Studi Perguruan Tinggi
Hotel Aston Kuta || 23 Agustus 2024



Sesi 2

Wahyu Wijayanto

Direktur Industri, Pariwisata,
dan Ekonomi Kreatif
Kementerian PPN/ Bappenas

Gunawan Eko Movianto

Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah I
Kementerian Dalam Negeri

Facilitated by:

Yusuf Suryanto

Koordinator Bidang Ketenagalistrikan
Direktorat KTI Kementerian PPN/Bappenas

Nike Diah Agustin

Staf Program CASE
Institute for Essential Services Reform



CASE
for Southeast Asia



Presentasi 3

Gambaran perencanaan pembangunan sektor industri konteks Wilayah Indonesia Tengah

Wahyu Wijayanto

Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif – Kementerian PPN/ Bappenas



Presentasi 3

Upaya mendorong peran pemerintah daerah dan sinergi pusat-daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan berbasis listrik terbarukan

Aris Munandra

Analisis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Dalam Negeri

Link Presentasi



CASE
for Southeast Asia



DISKUSI KELOMPOK

**Hadir Luring (In Person),
Fasilitator: Marcel&David**

1. Kalimantan Barat
2. Kalimantan Tengah
3. Kalimantan Selatan
4. Kalimantan Timur
5. Kalimantan Utara
6. Sulawesi Utara
7. Gorontalo
8. Sulawesi Selatan
9. Sulawesi Tengah
10. Sulawesi Tenggara
11. Sulawesi Barat
12. Bali
13. NTB
14. NTT

**Hadir Daring
(Online), Fasilitator: Nike&Rifqi**



1. Maluku
2. Maluku Utara
3. Papua
4. Papua Barat
5. Papua Barat Daya
6. Papua Tengah
7. Papua Pegunungan
8. Papua Selatan



CASE
for Southeast Asia

Guideline discussion



PRESENTASI HASIL DISKUSI

Coffee Break



KESIMPULAN

Post Event Survey





on the basis of a decision
by the German Bundestag

Organised by:



In collaboration with:



ISEW

INDONESIA
SUSTAINABLE ENERGY
WEEK 2024

10 – 13 SEPTEMBER

United Towards a Sustainable Future:
Advancing the Energy Transition for Indonesia Emas and Net Zero Emissions



PENUTUP



Implemented by





CASE
for Southeast Asia

Supported by:



Federal Ministry
for Economic Affairs
and Climate Action



INTERNATIONAL
CLIMATE
INITIATIVE

on the basis of a decision
by the German Bundestag

Contact

Us

[Name]

[Position]

[Name]

[Position]

on behalf of Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia

